

## Jejak antikolonial kesusastraan Balai Pustaka dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*

*Anticolonial traces in literary context of Balai Pustaka in “Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai”*

Ajeng Rahayu Tjaraka<sup>1,\*</sup> & Lily Tjahjandari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia

<sup>1,\*</sup>Email: [ajeng.rahayu11@ui.ac.id](mailto:ajeng.rahayu11@ui.ac.id); Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-9883-1990>

<sup>2</sup>Email: [ltjahjandari@gmail.com](mailto:ltjahjandari@gmail.com); Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0009-8925-3349>

### Article History

Received 15 November 2023

1<sup>st</sup> Revised 16 February 2024

2<sup>nd</sup> Revised 19 February 2024

Accepted 24 February 2024

Published 5 March 2024

### Keywords

Balai Pustaka; *Sitti Nurbaya*; literary history; representation; anticolonial.

### Kata Kunci

Balai Pustaka; *Sitti Nurbaya*; sejarah sastra; representasi; antikolonial.

### Read online

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.



### Abstract

In the creation of literary works, the author will always be influenced by the spirit of the times (*Zeitgeist*) that existed during the writing process. *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*, a novel by Marah Rusli, is one of the literary works that is close to Minangkabau culture. It was first published in 1922 by Balai Pustaka. Balai Pustaka established strict regulations in publishing reading materials for people in the Dutch East Indies to stem the nationalism of indigenous peoples. This research aims to find the strategies used by Marah Rusli to convey the anticolonial discourse contained in the work. The method used in this study is a qualitative descriptive method with the sociology of literature approach and Stuart Hall's concept of representation. The results that the researcher found in this study are the anticolonial traces conveyed by Marah Rusli using various strategies to escape the censorship of Balai Pustaka, namely (1) the construction of youth figures representing the modernity of the Dutch colonial government and the elderly representing the traditionality of indigenous people; (2) the portrayal of anticolonial attitudes through antagonistic characters; and (3) the use of the year of Hijri to deceive the Dutch colonial government.

### Abstrak

Dalam penciptaan karya sastra, pengarang akan selalu dipengaruhi oleh semangat zaman (*Zeitgeist*) yang ada saat proses penulisan karya. Novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* merupakan salah satu karya Marah Rusli yang lekat dengan budaya Minangkabau yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1922 oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka menetapkan regulasi yang ketat dalam memublikasikan bahan bacaan bagi masyarakat di Hindia Belanda untuk membendung sikap nasionalisme masyarakat pribumi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi yang digunakan oleh Marah Rusli dalam menyampaikan gagasan antikolonial yang terdapat dalam karya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra dan konsep representasi Stuart Hall. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah jejak-jejak antikolonial yang disampaikan Marah Rusli menggunakan berbagai strategi guna lolos dari penyensoran Balai Pustaka, yakni (1) pengonstruksian tokoh kaum muda yang merepresentasikan modernitas pemerintah kolonial Belanda dan melalui kaum tua yang merepresentasikan ketradisionalitas masyarakat pribumi, (2) penggambaran sikap antikolonial melalui karakter antagonis, dan (3) penggunaan tahun Hijriah untuk mengelabui pemerintah kolonial Belanda.

© 2024 The Author(s). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* by Universitas Mulawarman

### How to cite this article with APA style 7th ed.

Tjaraka, A. R., & Tjahjandari, L. (2024). Jejak antikolonial kesusastraan Balai Pustaka dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(1), 123—134. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v7i1.835>



## A. Pendahuluan

Penulisan karya sastra tidak lepas dari semangat zaman (*Zeitgeist*) yang melingkupinya. Dalam menulis karya sastra, pengarang akan terpengaruh pada keadaan sosiokultural yang ada pada masa penciptaan karya. Melalui sastra, pembaca dapat mengetahui kehidupan masyarakat di masa lampau, tanpa harus hadir dan mengalaminya secara langsung di suatu masa tertentu. Hal itu sesuai dengan pernyataan Ratna (2015, p. 338) bahwa karya sastra mengandung aspek-aspek kemasyarakatan yang mungkin pernah, sedang, dan akan terjadi. Sastra dapat dilihat sebagai jejak sejarah yang merekam informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi dan bermakna, baik dalam skala luas maupun sempit. Sebagai sumber sejarah, sastra bersifat naratif dan dapat disebut sebagai bahan-bahan dokumenter bagi studi sejarah. Sastra dapat dikategorikan sebagai *accepted history*, misalnya hikayat, babad, tambo, dan sejarah (dalam arti klasik) (Sugihastuti, 2011, p. 160). Banyak sastrawan yang menganggap karya sastranya sebagai cerminan masyarakat, alat perjuangan sosial, alat penyampaian aspirasi dan nasib masyarakat tertindas seperti yang tampak dalam gagasan realisme, naturalisme, dan realisme sosial (Faruk, 2014, p. 45).

Salah satu karya sastra yang sarat akan gambaran sosiokultural masyarakat masa lampau adalah *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* karya Marah Rusli. Novel yang menceritakan kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20 itu pertama kali dipublikasikan pada tahun 1922 dan termasuk ke dalam periodisasi sastra angkatan Balai Pustaka. Pengarang *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*, Marah Rusli, juga bersuku Minangkabau sehingga tentu sangat familier dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Marah Rusli lahir di Padang pada 7 Agustus 1889 dan meninggal pada usia 78 tahun di Bandung pada 17 Januari 1968. Berkat kejayaan *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*, Marah Rusli mendapatkan anugerah sastra dari Pemerintah Republik Indonesia. Karya-karya Marah Rusli lainnya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di antaranya adalah *La Hami* (1924) dan *Anak dan Kemenakan* (1956). Selain dikenal sebagai pengarang besar, Marah Rusli pun berprofesi sebagai dokter hewan hingga masa pensiunnya.

Novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* merupakan salah satu roman yang menandai kelahiran sastra modern Indonesia. Roman awal yang diterbitkan oleh Balai Pustaka adalah *Azab dan Sengsara* (1920) karya Merari Siregar (Rosidi, 1969, pp. 9–11). Dua tahun setelahnya, terbitlah *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* (1922) yang ditulis dalam bahasa Melayu Tinggi dan hingga saat ini dikenal sebagai sastra kanon Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* merupakan sokoguru Balai Pustaka. Pemberian istilah modern dalam periode kesusastraan Indonesia merujuk pada karya sastra yang berkembang pada masa terjadinya kontak dengan kebudayaan Eropa dan dipengaruhi oleh kebudayaan tersebut.

Balai Pustaka merupakan penerbit besar yang telah menerbitkan berbagai jenis buku. Perusahaan penerbitan itu didirikan pada tahun 1917 dan dikenal sebagai *Kantor voor de Volkslectuur* (Kantor Urusan Kesusastraan) yang merupakan penerus dari *Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* (Komisi untuk Sekolah Bumiputra dan Bacaan Rakyat). *Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* resmi berdiri pada 14 September 1908 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kantor Urusan Kesusastraan memiliki perusahaan percetakan sendiri pada tahun 1920 (Jones, 2015, p. 53). Balai Pustaka merupakan organ pemerintah kolonial Belanda yang memiliki semangat yang bertolak belakang dengan penerbit swasta, baik yang hanya bertujuan komersial maupun yang bervisi kebangsaan (Yudiono KS, 2007, p. 67). Selain buku sastra, Balai Pustaka juga menerbitkan buku anak-anak dan buku praktis mengenai panduan memasak, bercocok tanam, dan pengembangbiakan hewan (Jones, 2015, p. 54).

Pada awalnya *Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* bertugas untuk memeriksa dan mencetak naskah-naskah cerita rakyat, khususnya yang berbahasa daerah. Kemudian komisi tersebut juga mencetak saduran atau ringkasan buku-buku terjemahan yang menceritakan kepahlawanan orang-orang Belanda dan cerita klasik Eropa hingga akhirnya menerbitkan buku-buku sastra baru. Roman pertama yang diterbitkan oleh komisi ini adalah *Baruang ka nu Ngarora* (1914) karya D. K. Ardiwinata yang ditulis dalam bahasa Sunda (Rosidi, 1969, 19). Awal mula didirikannya *Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* adalah untuk menahan munculnya kesadaran nasional bumiputra yang dipicu oleh beredarnya bacaan liar yang banyak berisikan ajakan pemberontakan. Komisi tersebut berfungsi sebagai lembaga pemerintahan Hindia Belanda yang memberikan arahan dan aturan mengenai bacaan rakyat. Tugas komisi itu pun dinyatakan secara tegas oleh Dr. D. A. Rinkes yang merupakan sekretaris pertama komisi tersebut melalui kutipan berikut.

Hasil pengadjaran itu boléh djuga mendatangkan bahaja, kalau orang jang telah tahu membatja itu mendapat kitab2 batjaan jang berbahaja dari saudagar kitab jang kurang sutji dan dari orang2 jang bermaksud hendak mengatjau. Oléh sebab itu bersama2 dengan pengadjaran itu maka haruslah diadakan kitab2 batjaan jang memenuhi kegemaran orang kepada membatja dan memadjukan pengetahuannja, seboléh2nja menurut tertib dunia sekarang. Dalam usahanja itu harus didjauhkan segala jang dapat merusakkan kekuasaan pemerintah dan ketentraman negri (Rosidi, 1969, p. 19).

Dr. D. A. Rinkes menulis pernyataan di atas pada peringatan 25 tahun bertakhtanya Ratu Wilhelmina pada tahun 1923. Rinkes juga membuat kebijakan yang mengatur syarat-syarat penerimaan naskah oleh Balai Pustaka, yakni (1) tidak mengandung unsur politik, (2) harus membentuk karakter dan mengarah pada kecerdasan, dan (3) harus netral secara agama. Mahayana menyatakan bahwa regulasi tersebut dikenal sebagai Nota Rinkes (Putri et al., 2021). Rinkes merupakan seorang Belanda yang mendalami studi bahasa dan sastra. Selain itu, ia juga mempelajari Islam dan karakter masyarakat Jawa muslim. Dengan latar pendidikan tersebut, Rinkes dapat memajukan Balai Pustaka pada periode kepemimpinannya sebagai Direktur Balai Pustaka yang pertama. Ia juga dijuluki sebagai “Bapak Balai Pustaka”.

Fokus utama Rinkes dalam menjalankan program Balai Pustaka adalah distribusi bahan bacaan. Distribusi tersebut dilakukan melalui pendirian perpustakaan di sekolah-sekolah publik berbahasa pengantar Melayu untuk bumiputra. Furnivall menyebutkan bahwa pada tahun 1914 terdapat 680 perpustakaan. Kemudian, pada tahun 1920 bertambah menjadi 1.618 perpustakaan dan pada tahun 1930 semakin bertambah menjadi 2.528 perpustakaan yang didirikan (Jones, 2015, p. 54). Jumlah perpustakaan tersebut menunjukkan bentuk distribusi bahan bacaan yang sangat masif dilakukan oleh Balai Pustaka.

Sumardjo mengemukakan karakteristik umum dari karya-karya Balai Pustaka, yakni (1) bersifat kedaerahan, (2) bersifat romantik-sentimental, (3) bergaya bahasa seragam, dan (4) bertema sosial (Yudiono KS, 2007, pp. 74–75). Karya-karya Balai Pustaka menggunakan bahasa Melayu Tinggi yang secara tertib mengikuti bahasa tulisan sehingga menimbulkan suasana “bahasa buku”. Tema yang diangkat dalam karya sastra Balai Pustaka pun sangat dibatasi karena pada masa itu pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk menghindari tema-tema bacaan yang dapat menggugah sikap nasionalisme masyarakat. Pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk menjaga stabilitas kekuasaan pemerintahannya (Rosidi, 1969, p. 9).

Kesusastraan Indonesia pada awal abad ke-20 terlahir dari keterputusan masyarakat dengan tradisi. Karya sastra pada awal abad ke-20 memiliki kecenderungan untuk mengikuti tradisi sastra Eropa yang terlihat dari orientasi pengarangnya (Rosidi, 1988, p. 69). Balai Pustaka sebagai perusahaan penerbitan milik pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 merupakan produk dari dua kecenderungan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Pertama, Balai Pustaka sebagai lembaga yang membantu terwujudnya tujuan jangka panjang terhadap standarisasi bahasa lokal, terutama Melayu, untuk menjalankan pemerintahan kolonial Belanda yang efektif dan efisien. Kedua, pendirian Balai Pustaka merupakan ekspresi politik etis untuk kesejahteraan sosial yang diwujudkan melalui kesusastraan untuk mengubah perilaku dan ciri khas masyarakat pribumi (Jones, 2015, p. 53).

Penelitian terhadap korpus *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan sastra bandingan untuk menelaah penggunaan tema kawin paksa pada dua korpus yang berasal dari periode dan negara yang berbeda, yakni Indonesia dan Jerman. Penelitian tersebut menemukan persamaan dan perbedaan dalam penyajian tema kawin paksa dalam kedua karya yang disoroti melalui latar belakang terjadinya kawin paksa dan kehidupan pernikahan tokoh utama yang tidak terlepas dari kondisi sosiokultural pada masa penciptaan karya tersebut (Tjaraka, 2021). Penelitian lainnya terhadap novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* dilakukan dengan mendeskripsikan sistem kekerabatan Minangkabau dalam karya. Penelitian itu menghasilkan simpulan bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal sehingga menjadikan perempuan sebagai pemegang penuh peranan dan pengambil keputusan dalam keluarga (Setiawan, 2019).

Restiyani & Rusdiarti (2023) juga mengkaji novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Penelitian itu membandingkan transformasi resistensi tokoh perempuan dalam novel dan serial musikal *Nurbaya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bentuk resistensi perempuan, yakni kritik terhadap praktik domestik dalam novel dan resistensi dalam memperjuangkan kebebasan dan cita-cita dalam serial musikal. Febriani dan Efendi (2022) menganalisis aspek-aspek sosiologis dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Mereka mengungkapkan bahwa terdapat banyak permasalahan sosial yang diangkat dalam novel, di antaranya adalah poligami, kebangsawanan, adat istiadat Minangkabau, dan pengorbanan anak untuk orang tua. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak menyoroti jejak antikolonial dalam karya.

Penelitian lain terhadap novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* mengangkat unsur kesejarahan. Penelitian yang dikaji melalui sosiologi sastra itu menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan politik etis yang menjanjikan modernitas Eropa dengan membebaskan pajak perorangan

(*belasting*) terhadap masyarakat pribumi dalam karya. Pemberontakan dalam karya merujuk pada Perang Kamang yang terjadi pada tahun 1908 (Atikurrahman et al., 2021). Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada tiga bab terakhir dalam karya, sedangkan kebaruan yang diusung dalam penelitian ini adalah penggambaran jejak antikolonial dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* secara lebih menyeluruh, tidak terbatas pada pajak, perang, dan tiga bab terakhir dalam karya.

Penelitian terhadap novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* menarik untuk dilakukan, terlebih lagi penerbitan pertama karya sastra kanon tersebut sudah lebih dari seratus tahun yang lalu. Jika melihat pada masa penerbitannya yang sangat didominasi oleh Balai Pustaka, tentunya novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* telah melewati proses penyensoran yang sangat ketat sesuai dengan regulasi yang dipegang teguh oleh lembaga tersebut, yang bahkan juga dipimpin oleh seorang Belanda. Namun, ternyata kisah dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* juga mengandung jejak antikolonial. Hal ini tentunya merupakan suatu ironi yang menggambarkan hal-hal yang saling bertentangan. Antikolonial yang dimaksud di sini adalah sikap atau perasaan sentimen yang merujuk pada ketidaksukaan pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Marah Rusli tentu sangat berhati-hati dalam menulis karya tersebut agar dapat lolos penyensoran Balai Pustaka.

Selain itu, cerita dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* pun memiliki korelasi dengan peristiwa yang terjadi di Hindia Belanda terkait dengan pemberlakuan pajak terhadap pribumi. Penelitian ini akan membahas bagaimana wacana antikolonial dapat terselip dalam roman *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Selain itu, berbagai strategi yang digunakan oleh Marah Rusli agar roman tersebut lolos dari penyensoran Balai Pustaka juga akan dikupas dengan menggunakan konsep sosiologi sastra dan konsep representasi Stuart Hall. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jejak antikolonial dalam karya dan mengetahui strategi yang digunakan oleh Marah Rusli dalam menyampaikan gagasan antikolonial dalam karya yang dapat berhasil lolos dari pengamatan Balai Pustaka.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan sosiologi sastra, konsep representasi, dan sejarah masyarakat Minangkabau yang tercermin dalam sumber data primer. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Terdapat tiga tahapan dalam analisis data model tersebut, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Sugiyono, 2013, p. 246).

Data yang telah terkumpul akan dikupas menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk menyoroti wacana antikolonial yang terdapat dalam sumber primer yang bertolak belakang dengan karakteristik kesusastraan Balai Pustaka. Selain itu, konsep representasi Stuart Hall juga akan digunakan untuk menganalisis representasi kolonial Belanda dan pribumi yang ditampilkan dalam roman. Stuart Hall menyebutkan bahwa representasi melibatkan penggunaan bahasa (Nadhira, 2022, p. 162). Selain bahasa, tanda dan gambar juga dapat menjadi unsur terjadinya produksi konsep makna. Ketiga unsur tersebut melambangkan atau mewakili sesuatu. Relasi antara konsep dan bahasa memungkinkan seseorang untuk merujuk pada dunia 'nyata' maupun imajiner dari objek, orang, atau peristiwa (Hall, 1997).

## C. Pembahasan

Proses penciptaan karya sastra di bawah regulasi yang mengatur ketat batasan-batasan yang diperbolehkan dalam penulisan karya bukanlah suatu hal yang mudah. Pada awal abad ke-20, Marah Rusli pun tentu berusaha untuk menyesuaikan karyanya, *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*, agar dapat memenuhi syarat yang diberlakukan oleh Balai Pustaka sehingga dapat dipublikasikan kepada khalayak luas. Namun, setelah melalui proses penyensoran ketat, ternyata kita masih dapat menemukan jejak-jejak antikolonial yang disuarakan dan digambarkan oleh berbagai tokoh yang ada dalam karya. Hal tersebut membuktikan bahwa Marah Rusli sebagai pengarang tetap berusaha menyampaikan gagasan kebangsaan dalam karyanya meskipun tidak secara terang-terangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisasi dapat dilakukan dan disampaikan melalui karya sastra. Hasil penelitian yang sarat dengan sosiologi sastra dan sejarah sastra ini melengkapi khazanah kajian terhadap novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* yang sebelumnya banyak berfokus pada kawin paksa, sistem kekerabatan matrilineal, dan permasalahan sosial lainnya. Strategi yang

digunakan Marah Rusli dalam menyampaikan wacana antikolonial dalam konteks kesusastraan Balai Pustaka melalui novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* diuraikan melalui analisis berikut ini.

### 1. Pengonstruksian Representasi Kolonial Belanda dan Pribumi

Jejak-jejak antikolonial dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* disamarkan melalui berbagai cara, misalnya melalui konstruksi penggambaran kaum muda yang mewakili gambaran modernitas kolonial dan kaum tua yang mewakili gambaran tradisional masyarakat pribumi. Menurut Hall (1997) representasi makna dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan konstruksionis. Pelaku sosial menggunakan sistem konseptual budaya, linguistik, dan sistem representasional lainnya untuk mengonstruksi makna, membuat dunia bermakna, dan mengomunikasikan dunia secara bermakna kepada orang lain. Dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*, kaum muda direpresentasikan melalui tokoh Samsulbahri, Nurbaya, dan kawan-kawan sekolahnya, sedangkan kaum tua direpresentasikan oleh Sutan Mahmud Syah, Datuk Meringgih, Putri Rubiah, dan tokoh lain yang masih memegang teguh tradisi.

Jika dipandang dari jauh, tentulah akan disangka, anak muda ini seorang anak Belanda, yang hendak pulang dari sekolah. Tetapi jika dilihat dari dekat, nyatalah ia bukan bangsa Eropa; karena kulitnya kuning sebagai kulit langsung, rambut dan matanya hitam sebagai dawat. Di bawah dahinya yang lebar dan tinggi, nyata kelihatan alis matanya yang tebal dan hitam pula. Hidungnya mancung dan mulutnya halus. Badannya sedang, tak gemuk dan tak kurus, tetapi tegap. Pada wajah mukanya yang jernih dan tenang, berbayang, bahwa ia seorang yang lurus, tetapi keras hati; tak mudah dibantah, barang sesuatu maksudnya. Menilik pakaian dan rumah sekolahnya, nyata ia anak seorang yang mampu dan tertib sopannya menyatakan ia anak seorang yang berbangsa tinggi (Rusli, 1994, p. 9).

Sebagaimana tergambar dalam kutipan di atas, Samsulbahri sebagai kaum muda ditampilkan sebagai seorang bumiputra keturunan bangsawan yang berpendidikan dengan penampilan fisik rupawan serta berbudi baik. Namun, gambaran positif tersebut semata-mata disebutkan menyerupai penampilan seorang Belanda. Tidak hanya Samsulbahri, tokoh Nurbaya pun digambarkan berpenampilan menyerupai seorang Belanda: "*Gaunnya (baju nona-nona) terbuat dari kain batis, yang berkembang merah jambu. Sepatu dan kausnya, coklat warnanya*" (Rusli, 1994, p. 9). Sementara itu, tokoh Datuk Meringgih sebagai representasi pribumi digambarkan secara bertolak belakang dengan gambaran kaum muda seperti yang dinarasikan dalam kutipan berikut.

Badannya kurus tinggi, punggungnya bungkuk udang, dadanya cekung, serta kakinya pengkar, kepalanya besar, tetapi tipis di muka, serta sulah pula. Rambutnya yang tinggal sedikit sekeliling kepalanya itu, telah putih sebagai kapas dibusur. Misai dan janggutnya panjang, tetapi hanya beberapa helai saja, tergantung pada dagu dan ujung bibirnya, melengkung ke bawah. Umurnya lebih dari setengah abad. Matanya kecil, tetapi tajam, hidungnya bungkuk, mulutnya besar, giginya hitam dan kotor, yang di muka keluar sebagai gigi tupai. Telinganya besar, seperti telinga gajah, kulit mukanya berkarut-marut dan penuh dengan bekas penyakit cacar (Rusli, 1994, p. 84).

Penggambaran tampilan fisik para tokoh tersebut dapat menggiring simpati para pembaca. Pembaca karya memiliki kecenderungan untuk memihak atau bersimpati kepada tokoh yang berparas rupawan. Pembangunan simpati tersebut dapat lebih diperkuat dengan sikap dan watak tokoh. Samsulbahri dan Nurbaya digambarkan sebagai pemuda yang berhati lurus, berbeda sekali dengan watak Datuk Meringgih yang buruk, selaras dengan parasnya yang digambarkan dalam kutipan berikut.

Saudagar ini adalah seorang yang bakhil, loba dan tamak, tiada pengasih dan penyayang, serta bengis kasar budi pekertinya. Asal ia akan beroleh uang, asal akan sampai maksudnya, tiadalah diindahkannya barang sesuatu, tiadalah ditakutinya barang apa pun dan tiadalah ia pandang memandang. Terbujur lalu, terbelintang patah, katanya (Rusli, 1994, p. 84).

Kaum tua lainnya dalam karya juga digambarkan sebagai tokoh yang tidak berhati lurus, misalnya Putri Rubiah. Putri Rubiah adalah kakak dari Sutan Mahmud Syah, seorang penghulu di Padang yang juga merupakan ayah dari Samsulbahri. Berikut penggambaran tokoh Putri Rubiah di dalam karya.

Rukiah tunduk kembali kemalu-maluan, serta merah mukanya. Tatkala itu keluarlah seorang perempuan yang umurnya kira-kira 45 tahun, dari dalam bilik tadi, memakai baju kebaya panjang, dari cela hitam dan kain Bugis. Rupanya perempuan ini hampir seroman dengan Sutan Mahmud: hanya badannya kurus sedikit. Pada air mukanya yang agak berlainan dengan wajah muka Sutan Mahmud, terbayang tabiatnya yang kurang baik, yaitu dengki dan bengis (Rusli, 1994, pp. 19–20).

Strategi penggambaran kaum muda sebagai sosok ideal yang merepresentasikan modernitas kolonial ini digunakan oleh Marah Rusli untuk memenuhi tuntutan Balai Pustaka. Bangsa kolonial digambarkan sebagai kaum modern berpikiran terbuka dan berbudi baik sehingga masyarakat pribumi akan berkiblat kepada mereka sebagai sosok teladan atau anutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Balai Pustaka yang dikemukakan oleh (Jones, 2015, p. 53): “[...] *pendiriannya merupakan suatu ekspresi perhatian politik etis untuk kesejahteraan sosial yang berusaha untuk mengubah perilaku dan atribut dari penduduk pribumi melalui keterlibatan dalam kesusasteraan*”. Young (dalam Habsari, 2023, p. 630) menyatakan bahwa pembaca dapat menemukan nilai representasi melalui fenomena atau tokoh yang dinarasikan dalam teks.

## 2. Penggambaran Sikap Antikolonial melalui Karakter Antagonis

Sebagai upaya untuk menyasiasi penyensoran Balai Pustaka, Marah Rusli juga memanfaatkan tokoh-tokoh yang cenderung tidak disukai pembaca untuk menyuarakan sikap dan perasaan antikolonial. Jika pembaca tidak cermat, mereka akan tergiring dengan perasaan antipati terhadap para tokoh itu sehingga menganggap pernyataan mereka hanya sebagai angin lalu padahal sarat akan ideologi kebangsaan pengarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Santosa (dalam Fatmawati & Rizal, 2023, p. 192) yang menyebutkan bahwa novel dibangun oleh unsur-unsur intrinsik seperti tokoh, alur, dan latar untuk menggambarkan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan perspektif pengarang. Kalau pun Balai Pustaka menyadari ujaran-ujaran antikolonial yang disampaikan para tokoh antagonis itu, mereka tidak terlalu menganggap hal tersebut krusial karena kaum muda yang merepresentasikan gambaran modernitas kolonial ditampilkan sebagai tokoh protagonis, sedangkan kaum tua yang merepresentasikan gambaran tradisional masyarakat pribumi ditampilkan sebagai tokoh antagonis. Ujaran antikolonial dapat kita temui dalam karya seperti yang disampaikan melalui tokoh Putri Rubiah berikut ini.

“Tidakkah tersia-sia namanya itu? Tidak dilihat-lihat dan tidak diindahkan. Entah berbaju entah tidak, entah kelaparan entah kesusahan, entah sakit entah mati. Anakmu kaumasukkan ke sekolah Belanda, kau turut segala kehendaknya, makan tak kurang, pakaian cukup. Jika hendak pergi, bendimu telah tersedia akan membawanya, dan tiada lama lagi akan engkau kirim pula ia ke Jakarta, meneruskan pelajarannya. Dari situ barangkali ke negeri Belanda pula karena kepandaian di sana, belumlah memadai baginya. Kalau ada sekolah untuk menjadi raja, tentulah ke sana pula kauserahkan anakmu itu, sebab ia tak boleh menjadi orang sebarang saja, melainkan harus menjadi orang yang berpangkat tinggi. Bukankah sekalian itu memakan biaya? Untuk anakmu selalu ada uangmu, untuk anakku selamanya tak ada” (Rusli, 1994, p. 84).

Tokoh Putri Rubiah menunjukkan pendapat sentimen antikolonial melalui pernyataannya di atas. Ia mengutarakan ketidaksukaannya mengenai masyarakat pribumi yang berusaha meniru sikap dan perilaku masyarakat kolonial agar mendapat pengakuan yang lebih baik, pandai, dan beradab dari masyarakat kebanyakan. Pendapat Putri Rubiah tersebut tersamarkan oleh gambaran sikapnya yang disampaikan secara lebih mencolok oleh pengarang sehingga pembaca akan lebih menyoroti pada betapa menyebalkannya sikap dan sifat Putri Rubiah.

Pada tokoh Datuk Meringgih, meskipun ia telah dikenal sebagai seorang yang rakus, licik, dan tamak terhadap harta, masyarakat pribumi tetap memilih untuk meminjam uang padanya. Sutan Mahmud Syah yang merupakan seorang pejabat pemerintah dan Baginda Sulaiman yang merupakan seorang saudagar kaya pun meminjam uang pada Datuk Meringgih.

Sungguhpun Datuk Meringgih tiada disukai orang, karena tabiat dan kelakuannya yang buruk dan loba tamaknya itu, tetapi ia ditakuti dan disegani orang juga, sebab hartanya yang tiada ternilai banyaknya itu: lebih-lebih oleh mereka yang acap kali kesusahan uang. Karena ialah tempat meminjam, walaupun dengan bunganya yang terkadang-kadang sampai separuh daripada pinjaman. Bila telah sampai kepada waktu perjanjian, hutang itu belum juga dibayar oleh yang meminjam, niscaya tiadalah diberi maaf lagi Datuk Meringgih, melainkan didakwanya mereka dan dirampasnya panjar gadaian itu (Rusli, 1994, p. 88).

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa meskipun Datuk Meringgih dikenal sebagai lintah darat, masyarakat tetap memilih menjatuhkan diri mereka padanya. Sutan Mahmud Syah yang merupakan seorang penghulu yang bekerja di bawah instansi pemerintah kolonial Belanda pun lebih memilih untuk meminjam uang pada Datuk Meringgih, padahal bisa saja ia mencoba untuk meminjam pada pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu memegang kuasa, tidak hanya di Padang, tapi juga di bumi nusantara. Namun, pemerintah kolonial Belanda pun seperti tak berkecukupan menghadapi perilaku Datuk Meringgih.

Tatkala mendengar perkataan ayahku ini, merentaklah ia dengan marahnya, lalu berkata, “Jika demikian, tanggunglah olehmu!” lalu diserahkannya perkara itu kepada pegawai Belanda, yang datang bersama-sama dengan dia. Seorang daripada tuan ini berkata, sambil mendekati ayahku, “Walaupun dengan sedih hati, tetapi terpaksa hamba akan membawa tuan ke dalam penjara, atas kemauan Datuk Meringgih.”

“Dan hamba terpaksa pula menyita rumah dan sekalian harta tuan hamba,” kata pegawai yang lain (Rusli, 1994, 119).

Melalui pernyataan di atas, kita dapat melihat bahwa kedua pegawai Belanda yang datang bersama dengan Datuk Meringgih ke kediaman Baginda Sulaiman untuk menagih hutang padanya, tunduk pada Datuk Meringgih. Hal ini tentu ironis karena pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa pada saat itu, bahkan banyak masyarakat pribumi dari kalangan ningrat berlomba-lomba mengambil hati pemerintah.

Sementara itu, Datuk Meringgih ditampilkan berbeda. Ia ditampilkan sebagai entitas individu independen yang bahkan menolak takluk pada Belanda. Independensi Datuk Meringgih ditampilkan melalui kekayaannya yang bahkan juga terkenal hingga negara-negara lain. Dalam karya disebutkan bahwa pada masa itu, tidak ada saudagar Melayu di Padang yang dapat menandingi kekayaan Datuk Meringgih, bahkan semua masyarakat Eropa, Cina, India, dan Arab yang dikenal kaya dan berpangkat di Padang berteman dengan Datuk Meringgih (Rusli, 1994, p. 15). Perlawanan Datuk Meringgih terhadap Belanda terlihat melalui hasutannya terhadap masyarakat pribumi untuk menolak pemberlakuan *belasting* (pajak tahunan individu) meskipun ia melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya, yakni menghindari membayar pajak dengan nominal besar atas harta bendanya yang melimpah. Pengarang seolah-olah ingin menampilkan perlawanan pribumi untuk takluk pada pemerintah Hindia Belanda melalui sikap Datuk Meringgih.

Jejak antikolonial lainnya yang ditampilkan oleh pengarang adalah melalui hubungan terlarang antara Sitti Nurbaya dan Samsulbahri. Meskipun keduanya saling mencintai dan kenyataan bahwa keduanya merupakan sepasang kekasih sebelum Nurbaya menikah dengan Datuk Meringgih, perbuatan keduanya tidak dapat dibenarkan.

Mendengar pantun ini, tiadalah tertahan oleh Nurbaya hatinya lagi, lalu dipeluknya Samsu dan diciumnya pipinya. Dibalas oleh Samsu cium kekasihnya ini dengan pelukan yang hasrat. Di dalam berpeluk dan bercium-ciuman itu, tiba-tiba terdengar di belakang mereka, suara Datuk Meringgih berkata demikian, “Itulah sebabnya, maka keras benar hatimu akan pulang, dan tiada hendak berbalik kepadaku. Bukannya hendak menjaga ayahmu, sebagai katamu, hanya akan bersenang-senangkan diri dengan kekasihmu. Inilah perbuatan kaum muda, kaum yang terpelajar, yang beradat sopan santun, tetapi memperdayakan suami, supaya dapat bersenda gurau dengan laki-laki, di tempat yang gelap, sedang ayah sendiri, sakit keras. Inilah rupanya kelebihan kaum muda daripada kami kaum kuno. Inilah yang dipelajari di sekolah tinggi, dengan belanja dan susah payah yang tida sedikit. Jika serupa ini, benar juga pikiran kami kaum kuno: kemajuan kaum muda itu, bukan akan meninggikan derajatnya, bahkan akan membawanya dari tempat yang mulia ke tempat yang hina; membusukkan nama yang harum, menghilangkan derajat dan kemuliaan perempuan, sedang adat dan kepandaian lama, yang berfaedah bagi perempuan disia-siakan. Tak harus perempuan yang sedemikian dimajukan (Rusli, 1994, p. 152).

Dalam kutipan di atas, Sitti Nurbaya dan Samsulbahri sebagai kaum muda yang merepresentasikan kecondongan pada pemerintah kolonial Belanda digambarkan sebagai individu yang tidak setia. Namun, hal tersebut disamarkan oleh pengarang melalui romantisasi perselingkuhan Sitti Nurbaya dan Samsulbahri yang dibalut dengan kisah cinta penuh tragedi. Perbuatan khianat kaum muda pada karya juga ditampilkan melalui pilihan Samsulbahri menjadi tentara pemerintah kolonial Belanda setelah Nurbaya terbunuh akibat racun yang didalangi Datuk Meringgih. Namun, Samsulbahri tetap mengalami pergolakan batin terkait pilihannya tersebut sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut.

Bilakah aku dapat berhenti dari pekerjaan jahanam ini dan menjadi algojo bangsaku sendiri? Sesungguhnya untung yang sebagai untungku ini, agaknya tak adalah bandingannya dalam dunia ini. Dan apa sebabnya? Apa dosaku maka diazab sedemikian ini? Mereka yang tiada tahu akan nasibku, barangkali menyangka, bahwa aku gemar akan pekerjaanku sekarang ini. Tetapi hanya Tuhanlah yang tahu, betapa hancur hatiku, melihat berpuluh-puluh perempuan menjadi janda, berpuluh kanak-kanak menjadi yatim, beratus nyawa yang melayang beratus laki-laki remaja menjadi daif, karena kehilangan kaki atau tangan atau bagian badannya yang lain; beratus rumah yang roboh dan terbakar, berpuluh kampung dan desa yang rusak binasa dan beberapa pula harta yang dirampas. Akan tetapi apa hendak kukatakan? Sebab aku terpaksa berbuat sedemikian, untuk mendapat kematianku. Mengapakah sampai sekarang belum juga kuperoleh keinginan hatiku ini? Mengapakah nyawaku ini belum juga dicabut? Masih saja aku dipelihara! Belumkah juga habis hukumanku? Kini aku bukan disuruh membunuh bangsaku saja lagi, tetapi disuruh pula membunuh kaum keluarga, sahabat kenalanku sendiri (Rusli, 1994, p. 243).

Secara implisit pengarang hendak menyampaikan bahwa tentara pemerintah kolonial Belanda telah menyebabkan banyak korban berjatuhannya, baik tewas maupun terluka. Tentara pemerintah kolonial Belanda pada masa itu dikenal sebagai KNIL (*Koninklijk Nederlands-Indisch Leger*). Tentara KNIL tidak hanya terdiri atas tentara berkebangsaan Belanda saja, tetapi juga masyarakat pribumi. Oleh karena itu, Datuk Meringgih menyebut Samsulbahri yang kemudian dikenal sebagai Letnan Sam sebagai "*anjing Belanda*" (Rusli, 1994, p. 263).

### 3. Penggunaan Tahun Hijriah sebagai Bentuk Pengelabuan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda

Dalam novel juga disebutkan peristiwa pemberontakan terkait pemberlakuan *belasting*. Istilah *belasting* merujuk pada pajak tahunan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada masyarakat pribumi. Mulyani (2010, 799) menyatakan pajak *belasting* merupakan pajak harta benda atau hasil usaha dalam satu tahun yang harus dibayarkan masyarakat Minangkabau kepada pemerintah kolonial Belanda.

"Uang *belasting*? Uang apa pula itu?" tanya Datuk Malelo dengan senyum merengut. "Ada-ada saja kompeni itu, untuk mencari uang. Dan siapakah yang akan susah karena aturan itu? Tentulah anak negeri juga. Belumkah cukup uang rodi, uang jaga, uang ini dan uang itu? Sekarang ditambah pula dengan uang *belasting*? Uang apakah artinya itu, Malim?"

"Uang *belasting*, yaitu uang pajak harta benda atau pencaharian, dalam setahun-setahun," jawab Malim Batuah (Rusli, 1994, p. 244).

Kutipan di atas memperlihatkan pemberlakuan *belasting* yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Menurut masyarakat Minangkabau, *belasting* bertentangan dengan adat *Harato Pusako Tinggi* yang mengatur bahwa kepemilikan tanah pusaka keluarga bersifat kolektif dan diwariskan melalui sistem matrilineal. *Harato Pusako Tinggi* merupakan simbol kesejahteraan bagi keluarga Minangkabau (Zuhroh et al., 2023, p. 82). Pemerintah kolonial Belanda mengklaim bahwa *belasting* bertujuan untuk pembangunan negeri. Namun, masyarakat tidak merasakan manfaat dari pajak tersebut untuk mereka, selain untuk memperkaya pemerintah kolonial Belanda seperti yang disampaikan pengarang melalui kutipan berikut.

Kabar perkara *belasting* itu segeralah pecah dan kembang pada seluruh negeri, kota dan lorong, sampai ke kampung dan dusun yang kecil-kecil, sehingga tua muda, kecil besar, laki-laki perempuan, tahulah kabar ini. Sekalian mereka mencomel, karena berasa kurang adil diperintahi Belanda, yang pada pikiran mereka berbuat sekehendak hatinya, memaksa mereka membayar *belasting*, untuk menambah kekayaannya (Rusli, 1994, p. 244).

Peristiwa pemberontakan pajak dalam realitas sosial masyarakat juga pernah terjadi. Pemberontakan pajak di Minangkabau terjadi pada tahun 1908. Periode perubahan ekonomi itu terjadi bersamaan dengan kebangkitan modernisme Islam di Minangkabau (Abdullah, 1971). Hal ini juga terdapat dalam korpus penelitian yang melibatkan para ulama sebagai pemimpin dalam musyawarah terkait *belasting* yang digambarkan melalui kutipan berikut.



Di kampung Kota Tengah, dekat kota Padang, berkumpullah pada suatu malam, sekalian isi kampung ini, dalam mesjid. Sesudah sembahyang isya, kelihatanlah beratus-ratus orang di sana, orang kampung itu dan orang kampung-kampung lain, yang rupanya telah diberi tahu, bahwa pada malam itu akan diadakan rapat besar, untuk membicarakan perkara belasting. Orang yang seakan-akan menjadi kepala permusyawaratan ini, ialah haji-haji, orang alim, guru agama dan orang tua-tua. Di antara orang tua-tua itu kelihatanlah Datuk Meringgih, saudagar yang amat kaya di Padang (Rusli, 1994, p. 250).

Pemberontakan pajak yang terjadi pada tahun 1908 diduga merupakan peristiwa yang menginspirasi Marah Rusli dalam novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Hal tersebut diperkuat oleh petunjuk tahun kematian Samsulbahri yang tertulis pada nisannya. Samsulbahri atau Letnan Mas meninggal dunia setelah mendapatkan pengobatan akibat terluka parah di bagian kepala pada peristiwa pemberontakan *belasting*: “*Pada nisan yang ketiga tertulis “Inilah kubur Samsulbahri, anak Sutan Mahmud, Penghulu Padang, meninggal tanggal 5 Syafar, tahun 1326”* (Rusli, 1994, p. 271).

Tahun 1326 Hijriah merupakan tahun 1908 dalam penanggalan Masehi. Peristiwa ini bertepatan dengan terjadinya peristiwa sejarah sosial, yakni Perang Kamang di Minangkabau (Atikurrahman et al., 2021). Perang Kamang terjadi akibat pemberlakuan pajak perorangan (*belasting*). Perang Kamang diawali oleh gerakan petani yang melakukan protes terhadap pemerintah kolonial Belanda yang membebaskan pajak tanah dan hewan ternak kepada rakyat. Masyarakat Kamang (sekarang wilayah Selatan Bukittinggi) merupakan kelompok yang mengawali gerakan protes paling besar. Puncak gerakan perlawanan masyarakat Kamang terjadi pada 15 Juni 1908. Daerah Kamang menjadi front pertempuran antara kolonial Belanda dan masyarakat pribumi. Perlawanan masyarakat Kamang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial, seperti ulama, pemangku adat, pemuda, dan kaum perempuan. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Haji Abdul Manan (Lionar et al., 2020, pp. 118–119). Sementara itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Westenenk. Mereka berangkat dari Bukittinggi menuju Simpang Empat Kampung Tengah untuk mengepung kampung (Masyitah et al., 2019). Sejarah mengenai Perang Kamang didokumentasikan oleh beberapa surat kabar terbitan Belanda, di antaranya *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Telegraaf*, dan *Algemeen Handelsblad*. Hal itu menandakan bahwa peristiwa Perang Kamang pada masa itu cukup menyita perhatian pemerintah kolonial Belanda (Fitri et al., 2022, p. 3700).

Penggunaan penanggalan Hijriah dalam penulisan tahun kematian pada nisan Samsulbahri merupakan strategi yang digunakan Marah Rusli untuk mengelabui pemerintah kolonial Belanda agar lolos dari pengamatan Balai Pustaka. Pemerintah kolonial Belanda tampaknya tidak menangkap makna yang terdapat pada bulan dan tahun Hijriah yang tertera pada batu nisan merujuk pada peristiwa pemberontakan *belasting* karena masyarakat Eropa menggunakan sistem penanggalan Masehi, sedangkan sistem penanggalan Hijriah identik digunakan oleh umat muslim.

Pada akhir kisah dalam karya, tokoh Samsulbahri atau Letnan Mas digambarkan telah kembali menjadi seorang Minangkabau setelah berkhianat menjadi tentara pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut ditandai dengan takbir yang diucapkan olehnya sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya: “*Inilah pesannya: bila... ia ... mati minta... dikuburkan... antara ... ibunya... dan... Nurbaya... Allahu Akbar!*” (Rusli, 1994, p. 267). Hal ini menunjukkan bahwa sejauh apapun Samsulbahri tersesat dari akar budayanya, pada akhirnya ia akan kembali kepada jati diri asalnya.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Marah Rusli tetap berusaha menyampaikan gagasan antikolonial melalui karyanya, *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*, di tengah fungsi Balai Pustaka sebagai organ kolonial. Penyampaian gagasan antikolonial tersebut tidak dilakukan oleh Marah Rusli secara terang-terangan. Ia menggunakan berbagai strategi, yakni (1) pengonstruksian tokoh kaum muda yang merepresentasikan modernitas pemerintah kolonial Belanda dan kaum tua yang merepresentasikan ketradisionalitas masyarakat pribumi, (2) pembangunan sentimen antikolonial melalui karakter antagonis, seperti Datuk Meringgih dan Putri Rubiah, dan (3) penggunaan tahun Hijriah untuk mengelabui pemerintah kolonial Belanda, khususnya Balai Pustaka sebagai lembaga yang berwenang memublikasikan bahan bacaan di Hindia Belanda.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam tahap penyensoran ketat yang dilakukan oleh Balai Pustaka, pengarang tetap dapat berusaha membangun sikap kebangsaan masyarakat pribumi melalui karyanya. Namun, untuk mengetahui dan memahami maksud pengarang dibutuhkan proses pembacaan yang kritis. Marah Rusli juga mengangkat peristiwa-peristiwa yang melibatkan pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat pribumi yang terjadi dalam realitas sosial ke dalam karyanya, misalnya peristiwa Perang

Kamang sebagai pemberontakan *belasting* dalam karya. Dalam menyampaikan gagasan antikolonialnya, Marah Rusli tetap terpengaruh oleh semangat zaman (*Zeitgeist*) yang terdapat pada awal abad ke-20, yakni kental dengan unsur kedaerahan yang juga merupakan karakteristik dari karya-karya Balai Pustaka. Agar tidak mengalami nasib serupa dengan bacaan liar yang secara eksplisit menyerukan ajakan perlawanan bagi pribumi terhadap Belanda yang pada akhirnya dilarang beredar, Marah Rusli berusaha menyesuaikan karyanya dengan regulasi Balai Pustaka, dengan menambahkan sisipan gagasan antikolonialnya secara terselubung. Terbatasnya rujukan pustaka mengenai penelitian sejarah sastra tentunya membuat penelitian ini pun tidak luput dari kekurangan, misalnya mengenai detail peristiwa Perang Kamang. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan mengenai penelitian sejarah kesusastraan Balai Pustaka, khususnya mengenai wacana antikolonial dalam situasi sosial masyarakat Minangkabau.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1971). *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927—1933)*. Cornell Modern Indonesia Project.
- Atikurrahman, M., Ilma, A. A., Dharma, L. A., Affanda, A. R., Ajizah, I., & Firdaus, R. (2021). Sejarah Pemberontakan dalam Tiga Bab: Modernitas, Belasting, dan Kolonialisme dalam Siti Nurbaya. *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.1.1-22>
- Faruk. (2014). *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-modernisme*. Pustaka Pelajar.
- Fatmawati, G., & Rizal, M. S. (2023). Muatan Penyimpangan Sosial dalam Novel Seandainya Aku Boleh Memilih Karya Mira W: Kajian Sosiologi Sastra. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(1), 191–204. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i1.587>
- Febriani, E. F., & Efendi, A. (2022). Sociological Aspects in Siti Nurbaya's Novel by Marah Rusli. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 5(4), 167–171. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2022.5.4.20>
- Fitri, H., Asnan, G., & Nopriyasman, N. (2022). Historiografi Perang Kamang 1908: Kategorisasi Penulisan oleh Orang Minang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 3699–3712. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8672>
- Habsari, W. A. L. (2023). Internalisasi Nilai Pelestarian Alam dan Pendidikan Karakter melalui Representasi Kejahatan Lingkungan dalam Sastra Anak Karya Okky Madasari. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 625–644. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.692>
- Hall, S. (1997). The Work of Representation. Dalam S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications Ltd.
- Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta.
- Lionar, U., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2020). Plakat Panjang Hingga Perang Kamang: Gerakan Rakyat Minangkabau Menentang Pajak Kolonial Belanda. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 113–122. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3409>
- Masyitah, Ibrahim, B., & Melay, R. (2019). Peristiwa Perang Kamang Tahun 1908 (Gerakan Rakyat Kamang Terhadap Belanda). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 53–61. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/23369>
- Mulyani, Y. (2010). Nasionalisme dalam Siti Nurbaya Karya Marah Rusli. *Jurnal Sosioteknologi*, 9(19), 797–811. <https://multisite.itb.ac.id/kkik-fsrd/wp-content/uploads/sites/154/2007/04/3.-B.-Yeni.pdf>
- Nadhira, N. A. (2022). Representasi Nilai Moral pada Film Yang Berjudul “Bebas” (Kajian Sosiologi Sastra). *Deiktis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 2(2), 161–169. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v2i2.256>
- Putri, S., Yuliati, D., & Puguh, D. R. (2021). The Policies of Balai Pustaka as the Dutch Colonial Government's Publishing Agency in 1917-1942. *Indonesian Historical Studies*, 5(1), 9–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ihis/article/view/10451>

- Ratna, N. K. (2015). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Pustaka Pelajar.
- Restiyani, A., & Rusdiarti, S. R. (2023). Transformasi Resistensi Perempuan dalam Novel *Sitti Nurbaya* Karya Marah Rusli ke Serial Musikal *Nurbaya*. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(2), 607–624. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i2.685>
- Rosidi, A. (1969). *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*. Ganaco.
- Rosidi, A. (1988). *Kapankah Kesusasteraan Indonesia Lahir: Beserta Sepilihan Karangan Lainnya*. CV Haji Masagung.
- Rusli, M. (1994). *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Balai Pustaka.
- Yudiono KS. (2007). *Pengantar Sejarah Sastra Indonesia*. PT Grasindo.
- Setiawan, A. (2019). Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Adat Minangkabau pada Novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* Karya Marah Rusli. *Alfabeta: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 2(1), 92–104. <https://doi.org/10.33503/alfabeta.v2i1.461>
- Sugihastuti. (2011). *Teori Apresiasi Sastra*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Tjaraka, A. R. (2021). The Theme of Forced Marriage in Balai Pustaka Novel *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai* by Marah Rusli and Realism Novel *Effi Briest* by Theodor Fontane. *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional HISKI*, 82–88. <https://prosiding.hiski.or.id/ojs/index.php/prosiding/article/view/12>
- Zuhroh, F., Nada, A. Q., Taufiqoh, F. U., Lutfiyah, S. K., Husna, S. A., & Khodafi, M. (2023). Perlawanan Tak Kunjung Padam: Adat, Agama, dan Resistensi Terhadap Kolonial dalam *Sitti Nurbaya*. *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 4(2), 80–93. <https://doi.org/10.15642/suluk.2022.4.2.80-93>

